

**ANALISIS PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN  
SEBELUM DAN SESUDAH MERGER  
PADA PD BPR BKK KABUPATEN KENDAL**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**YENI KUSUMANINGSIH**  
**NIM. C2C006156**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2010**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Yeni Kusumaningsih  
Nomor Induk Mahasiswa : C2C006156  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi  
Judul Skripsi : **ANALISIS PERBEDAAN KINERJA  
KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH  
MERGER PADA PD BPR BKK BOJA**

Dosen Pembimbing : Drs. H. Idjang Soetikno, MM., Akt

Semarang, 22 September 2010

Dosen Pembimbing,

(Drs. H. Idjang Soetikno, MM., Akt)

NIP. 130422785

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Yeni Kusumaningsih  
Nomor Induk Mahasiswa : C2C006156  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi  
Judul Skripsi : **ANALISIS PERBEDAAN KINERJA  
KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH  
MERGER PADA PD BPR BKK BOJA**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 12 Oktober 2010**

Tim Penguji :

1. Drs. H. Idjang Soetikno, MM., Akt (.....)
2. Dr. Etna Nur Afri Y, MSi. Akt. (.....)
3. Nur Cahyonowati, SE. Msi. Akt. (.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, YENI KUSUMANINGSIH, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **ANALISIS PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH MERGER PADA PD BPR BKK KABUPATEN KENDAL** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/ atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Agustus 2010

Yang membuat pernyataan,

YENI KUSUMANINGSIH  
NIM. C2C006156

## **ABSTRACT**

*According to single presence policy which is regulated on PBI No. 8/16/PBI/2006, in Kendal there are twelve BPR BKK consolidated into PD BPR BKK Boja. Bank consolidation is expected to create an efficient and strong BPR and also be able to compete with commercial bank. Comparing to commercial bank, BPR has an important role in supporting small and medium-sized entrepreneurs (SMEs) because it can be founded in villages and sub-districts.*

*Using financial statement of PD BPR BKK Boja in 2005-2009 and paired sample t-test, the financial performance is analyzed in relation to the merger and change in financial performance.*

*This research study analyzed the change of PD BPR BKK Boja's financial performance after and before merger. The financial performance is measured by CAMEL, but this study could not measure management aspect because of the scarcity of data. The result of this study found that there is no change in financial performance after merger. Asset and earning of PD BPR BKK Boja changed significantly. But there are no changes significantly in capital and liquidity performance. Capital and asset decrease after merger, but earning and liquidity increase after merger.*

*Key words: single presence policy, merger, CAMEL, financial performance.*

## ABSTRAK

Berdasarkan keputusan tentang kepemilikan tunggal yang diatur dalam PBI No. 8/16/PBI/2006, 12 BPR BKK yang ada di Kabupaten Kendal digabung ke dalam PD BPR BKK Boja. Dengan penggabungan usaha ini diharapkan dapat menciptakan BPR yang sehat, efisien dan mampu bersaing dengan bank umum. BPR dianggap memiliki peranan penting dalam mendorong perkembangan UKM dibanding Bank Umum karena dapat didirikan di desa-desa dan kecamatan-kecamatan.

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan PD BPR BKK Boja dari tahun 2005 sampai 2009 dan *paired sample t-test*, untuk meneliti apakah ada perbedaan kinerja keuangan sebelum dan setelah merger.

Penelitian ini meneliti perubahan kinerja keuangan PD BPR BKK Kabupaten Kendal sebelum dan sesudah merger. Kinerja keuangan diukur dengan CAMEL, namun dalam penelitian ini tidak dapat mengukur aspek manajemen karena keterbatasan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perubahan signifikan pada kinerja keuangan setelah merger. Aset dan rentabilitas mengalami perubahan yang signifikan. Tetapi kinerja di bidang modal dan likuiditas tidak mengalami perubahan yang signifikan. Modal dan aset mengalami penurunan setelah merger, sedangkan rentabilitas dan likuiditas mengalami kenaikan.

Kata kunci: kepemilikan tunggal, merger, CAMEL, kinerja keuangan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan bimbingan-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Penelitian berjudul "ANALISIS PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH MERGER PADA PD BPR BKK KABUPATEN KENDAL" merupakan penelitian empiris yang bertujuan untuk mengetahui apakah merger mempengaruhi kinerja keuangan pada PD BPR BKK KABUPATEN KENDAL.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk bantuan, doa, dukungan, perhatian, dan masukan kepada:

1. Bapak Dr. H. M. Chabachib, MSi., Akt. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi yang telah mendedikasikan waktunya dan menjadi penggerak kemajuan Fakultas Ekonomi.
2. Bapak Drs. H. Idjang Soetikno, MM., Akt. Selaku dosen pembimbing dalam penelitian ini, yang senantiasa memberikan waktu untuk membantu penulis selama proses skripsi ini berjalan.
3. Bapak Prof. Dr. Muchamad Syafrudin, Msi., Akt. Selaku dosen wali yang selalu memberikan pertimbangan dan nasihat.
4. Segenap dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Orangtua tercinta (Bapak Djalmo) atas kesabarannya yang luar biasa serta dukungan dan doa bagi penulis, juga almarhumah Ibu Sukiyah, semoga penulis dapat membanggakan orangtua dan keluarga.

6. Bapak Dodi dari PD BPR BKK Kabupaten Kendal, terima kasih bantuannya dalam mendapatkan data laporan keuangan publikasi.
7. Sahabat-sahabat Efi, Agy, Elis, Nina, Elisa atas kebersamaan dan persahabatan yang telah terjalin, Ferri dan Dewi, teman seperjuangan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga persahabatan kita tetap terjaga dan kita berhasil meraih cita-cita.
8. Teman-teman yang selalu memberi semangat ,dukungan dan bantuan kepada penulis Arum, Cory, Dea, Desty, Hana, Rizky.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Demikian penelitian ini, kiranya dapat bermanfaat untuk penelitian berikutnya. Dengan kerendahan hati penulis bersedia menerima saran dan kritik yang membangun demi penelitian yang lebih baik.

Semarang, Agustus 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Landasan Teori .....	8
2.2 Merger dan Akuisisi.....	8
2.2.1 Pengertian Merger dan Akuisisi.....	8
2.2.2 Jenis Merger dan Akuisisi.....	10
2.2.3 Alasan Merger dan Akuisisi.....	13
2.2.4 Kelebihan dan Kekurangan M&A .....	15
2.2.5 Faktor Keberhasilan Merger dan Akuisisi .....	15
2.2.6 Dasar Hukum Penggabungan Usaha pada Bank.....	16
2.3 Bank Perkreditan Rakyat .....	17
2.3.1 Pengertian dan Kegiatan BPR.....	17
2.3.2 Pengertian Kesehatan Bank .....	22
2.3.3 Kinerja Keuangan .....	23
2.4 PD BPR BKK Boja.....	25
2.5 Penelitian Terdahulu .....	29
2.5.1 Penelitian Agustina Maria Wulansari .....	29
2.5.2 Penelitian Palupi Ratna Kurniasari .....	30
2.5.3 Penelitian Siti Rizanah.....	30
2.6 Kerangka Pemikiran .....	31
2.7 Hipotesis .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
3.1 Populasi dan Sample.....	34
3.2 Data dan Sumber Data .....	34
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	35
3.4 Definisi Operasional .....	35
3.5 Uji Normalitas Data.....	36
3.6 Analisis Hipotesis .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1 Deskripsi Sample Penelitian .....	38
4.2 Kinerja Keuangan Sebelum Merger .....	39
4.2.1 <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) .....	39
4.2.2 PPAP .....	39
4.2.3 <i>Return of Asset</i> (ROA).....	40
4.2.4 BOPO .....	40
4.2.5 <i>Net Interest Margin</i> (NIM) .....	41

4.2.6	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i> .....	41
4.2.7	<i>Cash Ratio</i> .....	42
4.3	Kinerja Keuangan Setelah Merger.....	42
4.3.1	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> .....	42
4.3.2	PPAP .....	43
4.3.3	<i>Return of Asset (ROA)</i> .....	43
4.3.4	BOPO .....	43
4.3.5	<i>Net Interest Margin (NIM)</i> .....	44
4.3.6	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i> .....	44
4.3.7	<i>Cash Ratio</i> .....	45
4.4	Uji Normalitas Data.....	45
4.5	Pembahasan Hipotesis .....	46
4.5.1	Capital .....	47
4.5.2	Aset .....	47
4.5.3	Rentabilitas.....	47
4.5.4	Likuiditas .....	47
4.6	Pembahasan .....	48
4.6.1	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> .....	48
4.6.2	PPAP .....	49
4.6.3	<i>Return of Asset (ROA)</i> .....	49
4.6.4	BOPO .....	49
4.6.5	<i>Net Interest Margin (NIM)</i> .....	49
4.6.6	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i> .....	50
4.6.7	<i>Cash Ratio</i> .....	50
BAB V	PENUTUP.....	51
5.1	Simpulan .....	51
5.2	Keterbatasan.....	52
5.3	Saran .....	53
	DAFTAR PUSTAKA .....	54
	LAMPIRAN.....	56

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Nama-Nama PD BPR BKK Boja Kabupaten Kendal .....	38
Tabel 4.2 Rasio CAMEL PD BPR BKK Boja 05-06 .....	39
Tabel 4.3 Rasio CAMEL PD BPR BKK Boja 08-09 .....	42
Tabel 4.4 Uji Normalitas Data dengan <i>Kolmogorov Smirnov</i> .....	45
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Hipotesis dengan <i>Sample Paired T-test</i> pada PD BPR BKK Boja.....	46
Tabel 4.6 Perbandingan Rasio CAMEL Sebelum dan Setelah Merger pada PD BPR BKK Boja .....	48

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	31

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A <i>Capital Adequacy Ratio</i> PD BPR BKK Kabupaten Kendal Sebelum Merger.....	56
Lampiran B Aktiva Tetap Terhadap Modal PD BPR BKK Kabupaten Kendal Setelah Merger.....	57
Lampiran C <i>Return of Asset</i> PD BPR BKK Kabupaten Kendal Sebelum Merger.....	58
Lampiran D <i>Net Profit Margin</i> PD BPR BKK Kabupaten Kendal Setelah Merger.....	59
Lampiran E Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional PD BPR BKK Kabupaten Kendal Sebelum Merger.....	60
Lampiran F <i>Net Interest Margin</i> PD BPR BKK Kabupaten Kendal Setelah Merger.....	61
Lampiran G <i>Loan to Deposit Ratio</i> PD BPR BKK Kabupaten Kendal Sebelum Merger.....	62
Lampiran H Rasio Camel PD BPR BKK Kabupaten Kendal Setelah Merger.....	63

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dunia bisnis saat ini maju pesat. Hal ini disebabkan adanya persaingan bebas dan globalisasi. Persaingan bebas dalam dunia bisnis ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan baru yang ikut masuk dalam kompetisi. Globalisasi membuat perusahaan mengembangkan strategi untuk tetap dapat mengikuti persaingan.

Strategi yang dikembangkan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Secara internal dilakukan dengan memperluas perusahaan dari dalam, seperti peningkatan kapasitas produksi, menambah produk, efisiensi biaya atau mencari pasar baru. Sedangkan strategi eksternal adalah meningkatkan nilai perusahaan dengan menggabungkan dua atau lebih perusahaan. Merger dan akuisisi adalah cara yang biasa dipilih perusahaan sebagai strategi eksternal dalam mempertahankan hidupnya.

Ada kecenderungan perusahaan lebih memilih strategi merger dan akuisisi dari waktu ke waktu (Hitt, 2002). Strategi eksternal dengan merger dan akuisisi lebih cepat menunjukkan peningkatan dibanding strategi internal. Hal ini dianggap sesuai dengan tuntutan persaingan yang mengharuskan perusahaan untuk menghasilkan peningkatan dengan cepat. Perusahaan melakukan merger sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan juga sebagai cara bertahan dalam kompetisi (Lyroudi et.al, 2000). Merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih dengan

tetap menggunakan nama salah satu perusahaan. Sedangkan akuisisi adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan dengan membeli sebagian saham yang dimiliki perusahaan lain, namun perusahaan tersebut masih berdiri sendiri-sendiri.

Di Indonesia, aktivitas merger dan akuisisi mulai banyak dilakukan sejalan dengan semakin majunya pasar modal di Indonesia. Alasan perusahaan lebih memilih merger dan akuisisi karena dengan strategi tersebut, tujuan perusahaan akan cepat tercapai dibanding jika perusahaan memulai usahanya dari awal. Nilai perusahaan juga akan meningkat setelah melakukan merger dan akuisisi dibanding jika perusahaan dijual secara terpisah. Manfaat lain dari merger dan akuisisi adalah adanya peningkatan skill manajerial, transfer teknologi, dan efisiensi biaya (Hitt, 2002).

Semakin banyaknya merger dan akuisisi antar perusahaan juga terjadi antar bank. Bank adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Untuk menciptakan perbankan yang sehat, efisien dan mampu bersaing dalam persaingan bebas dan globalisasi, perlu adanya peraturan yang mengatur merger dan akuisisi antar bank. Salah satu peraturan yang mengatur merger dan akuisisi antar bank adalah Peraturan Pemerintah RI no.28 tahun 1999. Dalam peraturan tersebut, merger adalah penggabungan dua bank atau lebih dengan mempertahankan salah satu bank dan membubarkan bank-bank lain tanpa likuidasi. Sedangkan akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank sehingga terjadi perubahan dalam pengendalian bank tersebut.

Merger dan akuisisi antar bank terjadi sesuai dengan permintaan bank yang bersangkutan, permintaan Bank Indonesia, ataupun permintaan badan khusus yang

bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan. Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk meminta bank-bank melakukan merger dan akuisisi apabila bank tersebut menunjukkan ketidaksehatan dalam laporan kerjanya. Diharapkan setelah melakukan merger dan akuisisi, bank yang bersangkutan dapat menunjukkan peningkatan kinerja. Perubahan setelah merger dan akuisisi akan terlihat pada laporan keuangannya. Merger dan akuisisi dikatakan berhasil jika bank yang melakukan merger dan akuisisi menunjukkan peningkatan dalam kinerja keuangannya.

Penelitian ini difokuskan pada merger Bank Perkreditan Rakyat, terutama BPR BKK Boja. BPR berfungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, harus mampu menunjang modernisasi pedesaan dan memberikan pelayanan bagi pengusaha kecil. Berdasarkan fungsi tersebut, BPR dapat didirikan di desa-desa atau di wilayah kecamatan. Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa koperasi, perusahaan daerah, dan perseroan terbatas. BPR yang dimiliki pemerintah daerah disebut BPR BKK.

Merger pada bank ini terjadi karena adanya beberapa masalah yang dihadapi BPR. Masalah yang dihadapi BPR salah satunya adalah kurang didukung oleh SDM yang memadai. Hal ini menjadi penyebab kredit non lancar BPR melebihi ketentuan yang ditetapkan BI. Permasalahan lain yang dihadapi adalah penyelewengan setoran nasabah penyimpan dana.

Meskipun demikian, BPR memegang peran yang sangat strategis. Sampai saat ini masih sangat sedikit bank umum yang beroperasi sampai ke tingkat kecamatan, kecuali BRI melalui unit-unitnya. Dengan pertimbangan ini, BI menyarankan agar

beberapa BPR dimerger agar tercipta BPR yang sehat, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada pengusaha kecil yang berada di daerah-daerah.

Ide penggabungan BPR BKK ditawarkan BI dengan tujuan untuk memudahkan pengawasan BPR yang tersebar di setiap desa, baik dari sisi pemilik atau pemerintah daerah, maupun dari sisi Bank Indonesia. Penggabungan BPR ini diharapkan dapat meningkatkan modal yang lebih kuat serta meningkatkan kemampuan BPR dalam menghimpun dana dan menyalurkan kredit, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing BPR. Banyaknya manfaat yang dirasakan dari penggabungan BPR ini, pemerintah daerah berniat menggabungkan beberapa BPR BKK yang tersebar di setiap kabupaten/kota menjadi satu BPR BKK. Dengan demikian diharapkan terdapat satu BPR BKK di setiap kabupaten/kota.

Merger pada BPR dikatakan berhasil jika kinerja BPR tersebut meningkat. Peningkatan kinerja terlihat dari laporan keuangan BPR setelah merger. Helfert (1999) mengemukakan yang paling berkepentingan dalam mengukur kinerja perusahaan adalah investor, manajemen, pemerintah, dan masyarakat luas. Kinerja bank dapat diketahui dari tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank dimaksudkan untuk tolak ukur bagi pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Tingkat kesehatan suatu bank diukur dari beberapa aspek, yaitu: *capital*, *assets*, *management*, *earnings*, dan *liquidity*, atau disebut dengan CAMEL. Kelima aspek tersebut menggunakan rasio keuangan.

Berdasar penelitian sebelumnya, penelitian ini terfokus pengaruh merger dan akuisisi dengan membandingkan kinerja keuangan sebelum dan sesudah BPR merger. Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan rasio CAMEL. Oleh karena itu,

penelitian ini berjudul: **”Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger Pada PD BPR BKK Boja”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Merger beberapa BPR disebabkan oleh peraturan Bank Indonesia. Bank Indonesia mengharuskan merger beberapa BPR dengan alasan untuk memudahkan dalam pengawasan. Beberapa BPR dalam satu kabupaten/kota akan dimerger sehingga akan terdapat satu BPR BKK dalam setiap kabupaten/kota.

Selain untuk memudahkan pengawasan BPR, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penyebab merger. Masalah yang dihadapi BPR adalah kurangnya SDM yang memadai sehingga menyebabkan kredit non lancar yang dimiliki BPR melebihi ketentuan Bank Indonesia, yaitu sebesar 5%. Selain itu, juga terjadi penyelewengan setoran nasabah penyimpan dana.

Perubahan-perubahan setelah merger dan akuisisi akan tampak pada kinerja finansialnya. Kinerja finansial diukur dari laporan keuangan setelah merger dan akuisisi. Mengukur kinerja dari laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah rasio CAMEL yang sering digunakan untuk mengukur kinerja perbankan..

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

” Apakah kinerja keuangan pada PD BPR BKK Boja sebelum dilakukan merger akan berbeda dengan setelah dilakukan merger?”

### 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Merger dan akuisisi bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perusahaan yang diambil alih dan perusahaan yang mengambil alih. Sinergi ini dilihat dari sisi finansial maupun operasionalnya. Merger dan akuisisi memiliki dampak yang berbeda-beda bagi perusahaan yang bergabung. Di beberapa penelitian menunjukkan bahwa merger dan akuisisi menghasilkan *return* yang rendah dibanding sebelum merger dan akuisisi. Namun di penelitian lain menunjukkan kinerja perusahaan setelah bergabung meningkat dibanding sebelum bergabung.

Merger dan akuisisi dikatakan berhasil jika telah membawa peningkatan pada perusahaan yang bergabung. Dengan peningkatan tersebut diharapkan perusahaan dapat bertahan dalam persaingan yang semakin ketat. Tujuan merger dan akuisisi adalah mencapai pasar yang lebih luas, efisiensi biaya, dan peningkatan teknologi.

Merger pada beberapa Bank Perkreditan Rakyat diharapkan dapat membawa peningkatan value perusahaan, sehingga BPR tetap dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi pengusaha kecil. Keberhasilan merger ini dapat diukur dari kinerja keuangannya. Kinerja keuangan diukur dari rasio keuangan. Penelitian ini menggunakan rasio keuangan bank yang sering digunakan untuk mengukur kinerja perbankan. Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan Bank sebelum dan setelah merger.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai pengaruh merger pada kinerja keuangan BPR.

2. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemilik modal untuk menanamkan modalnya.
3. Bagi pengelola, dapat memberikan informasi dalam menentukan langkah-langkah operasional pengembangan usahanya.
4. Bagi masyarakat, informasi kinerja bank dapat menjadi acuan dalam memilih perusahaan perbankan untuk memenuhi kebutuhan akan jasa keuangan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab 1 Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, manfaat dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Dalam bab ini dijelaskan dasar teori, pengertian dan jenis merger.

Bab 3 Metode Penelitian terdiri dari metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, serta metode analisis yang digunakan.

Bab 4 Hasil dan Pembahasan terdiri dari penjelasan variabel sebelum merger dan sesudah merger, dan analisis perubahan setiap variabel setelah merger.

Bab 5 Penutup terdiri dari kesimpulan penelitian ini, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Penggabungan beberapa BPR dalam satu kabupaten/kota sehingga hanya terdapat satu BPR BKK dalam setiap kabupaten/kota bertujuan agar pengawasan dari pemilik dan Bank Indonesia lebih mudah, dan tercipta sinergi antar BPR yang merger. Berdasar tujuan tersebut, teori yang mendasari penggabungan BPR dalam penelitian ini adalah teori efisiensi. Teori efisiensi menjadi dasar usaha peningkatan kinerja manajemen dan pencapaian sinergi (Weston dan Copeland, 1996).

Dalam literatur tentang efisiensi terdapat 3 konsep mengenai efisiensi, yaitu: fungsi biaya (*cost function*), fungsi keuntungan standar (*standard profit function*), dan fungsi keuntungan alternatif yang telah dikembangkan (*developed alternative function*). Perbedaan dari ketiga konsep efisiensi tersebut terletak pada asumsi yang digunakan mengenai optimalisasi ekonomi ketika sebuah bank mengambil keputusan mengenai jumlah output dan input yang akan digunakan.

#### **2.2 Merger dan Akuisisi**

##### **2.2.1 Pengertian Merger dan Akuisisi**

Merger dan akuisisi sering disebut sebagai kombinasi bisnis (*bussiness combination*), yaitu penyatuan dua perusahaan atau lebih menjadi satu entitas ekonomi. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ross et al., merger adalah bentuk dari akuisisi. Keputusan merger dan akuisisi dipandang dari dua sisi, yaitu

keuangan perusahaan (*corporate finance*) dan strategi manajemen (*strategic management*). Merger dan akuisisi dipandang dari sisi keuangan perusahaan merupakan investasi jangka panjang yang harus dianalisis dari kelayakan bisnisnya. Jika dipandang dari strategi manajemen, merger dan akuisisi adalah strategi eksternal yang diambil perusahaan untuk menggabungkan nilai perusahaan sehingga tujuan perusahaan tercapai.

Merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih dengan tetap menggunakan nama salah satu perusahaan. Menurut Hitt et al. merger dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang setuju menggabungkan operasionalnya sehingga tercipta keunggulan kompetitif yang lebih kuat (dikutip dari Rizanah, 2007). Merger dapat diartikan secara luas dan sempit (Bryan Coyle, 2000). Secara luas, merger diartikan sebagai pengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Sedangkan pengertian merger secara sempit adalah penggabungan sumber daya dua perusahaan dengan ekuitas yang hampir sama. Menurut Morris (2000), merger serupa dengan pengambilalihan saham.

Akuisisi adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan dengan membeli sebagian saham yang dimiliki perusahaan lain, namun perusahaan tersebut masih berdiri sendiri-sendiri. Akuisisi adalah pengambilalihan kendali suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan masing-masing perusahaan, baik yang mengambil alih maupun yang diambil alih, masih tetap beroperasi sebagai badan hukum yang terpisah (Abdul Moin, 2004). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1998, akuisisi adalah pengambilalihan baik secara keseluruhan atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan peralihan pengendalian.

### 2.2.2 Jenis Merger dan Akuisisi

Berdasarkan aktivitas ekonomi, merger dan akuisisi dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu:

#### 1. Merger Horisontal

Merger horisontal adalah merger yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih yang bergerak di bidang yang sama. Tujuan dari merger dan akuisisi tipe horisontal adalah untuk mengurangi pesaing. Akibat dari merger horisontal adalah struktur pasar akan semakin terpusat pada industri ini.

#### 2. Merger Vertikal

Merger vertikal adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih yang beroperasi dalam tahapan-tahapan produksi yang berbeda. Merger dan akuisisi vertikal ini dilakukan jika perusahaan hulu digabung dengan perusahaan hilir. Tujuan merger dan akuisisi tipe ini untuk stabilisasi pemasok dan/atau pengguna produk. Merger dan akuisisi vertikal dibedakan menjadi dua tipe, yaitu: integrasi ke belakang atau ke bawah (*backward/downward integration*) dan integrasi ke depan atau ke atas (*forward/upward integration*).

#### 3. Merger Konglomerat

Merger konglomerat adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih yang beroperasi dalam industri yang tidak terkait. Merger konglomerat dilakukan saat perusahaan akan memasuki bidang industri lain yang berbeda dari industri awal.

#### 4. Merger Ekstensi Pasar

Merger ekstensi pasar adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih yang bekerja sama untuk memperluas pasar. Merger dan akuisisi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan lintas negara yang bertujuan untuk memperluas pasar hingga luar negeri dan penetrasi pasar. Pasar luar negeri akan dengan mudah dicapai tanpa harus membangun fasilitas produksi awal di negara yang dituju.

#### 5. Merger Ekstensi Produk

Merger ekstensi produk adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih yang bertujuan untuk memperluas lini produk masing-masing perusahaan. Merger ini dilakukan untuk memanfaatkan departemen riset dan pengembangan sehingga akan lebih efektif dalam inovasi produk.

Merger dan akuisisi berdasar pola yang diadopsi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

##### 1. *Mothership Merger*

Pola dari merger dan akuisisi ini adalah perusahaan yang dominan yang akan dipertahankan dan perusahaan akan beroperasi sesuai dengan perusahaan yang dominan. Jadi hanya akan ada satu sistem yang akan diadopsi, yaitu sistem dari perusahaan dominan.

##### 2. *Platform Merger*

Pola merger dan akuisisi *platform mergeri* berbeda dengan *mothership merger*. Pada pola ini, kekuatan dari masing-masing perusahaan yang merger akan tetap dipertahankan.

Akuisisi berdasar obyeknya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Akuisisi Saham

Akuisisi ini terjadi saat perusahaan menjual saham kepada pihak lain atau pengakuisisi. Pembelian saham dapat dilakukan sebagian atau seluruh saham yang belum atau yang sudah dikeluarkan perusahaan. Pembelian saham ini akan berakibat pada peralihan kendali perusahaan.

2. Akuisisi Aset

Akuisisi ini dilakukan dengan pembelian seluruh atau sebagian aset perusahaan oleh pengakuisisi. Pembelian sebagian aset disebut akuisisi parsial.

Akuisisi dan merger dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Pembayaran tunai
2. Pembayaran dengan penerbitan surat berharga, contohnya saham, obligasi, surat utang, dan surat berharga lain
3. Pembayaran campuran antara pembayaran tunai dan penerbitan surat berharga
4. Pembayaran sesuai cara pembayaran yang dipilih pihak yang diakuisisi, pembayaran tunai atau penerbitan surat berharga.

Dalam prakteknya, merger dan akuisisi dapat mengambil beberapa bentuk (Coyle, 2000), yaitu:

1. *Agresive*

Merger dan akuisisi bentuk ini dilakukan dengan paksaan, atau disebut juga sebagai *hostile take over*. Merger dan akuisisi yang dilakukan dengan paksa

biasanya akan mendapat tentangan dari manajemen perusahaan yang akan diambil alih.

## 2. *Defensif*

Bentuk merger dan akuisisi bentuk *defensif* dilakukan jika terjadi keadaan tawar menawar dari pihak yang akan diambil alih mengenai pihak mana yang akan mengambil alih. Bentuk *defensif take over* merupakan reaksi dari *agresif take over*.

## 3. *Negotiated*

Merger dan akuisisi bentuk *negotiated* merupakan kebalikan dari bentuk *agresive*.

### **2.2.3 Alasan Merger dan Akuisisi**

Ada beberapa alasan yang mendasari perusahaan melakukan merger dan akuisisi. Di antaranya adalah:

#### 1. Pertumbuhan atau diversifikasi

Perusahaan melakukan merger dan akuisisi karena menginginkan pertumbuhan, baik ukuran perusahaan maupun pasar saham. Diversifikasi juga menjadi alasan perusahaan melakukan merger dan akuisisi, sehingga perusahaan tidak perlu khawatir adanya produk baru.

#### 2. Sinergi

Dengan merger dan akuisisi diharapkan terjadi penghematan biaya overhead, sehingga tercipta peningkatan pendapatan. Perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi dengan tujuan tercipta sinergi biasanya perusahaan yang berada dalam industri yang sama.

3. Meningkatkan dana

Perusahaan bergabung dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi, sehingga diharapkan terjadi peningkatan daya pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban.

4. Menambah keterampilan manajemen atau teknologi

Perusahaan bergabung dengan perusahaan yang memiliki efisiensi manajemen dan teknologi canggih, sehingga diharapkan tercipta efisiensi manajemen dan peningkatan teknologi.

5. Pertimbangan pajak

Perusahaan yang mengalami kerugian pajak dapat bergabung dengan perusahaan yang mendapat keuntungan untuk memanfaatkan kerugian pajak.

6. Meningkatkan likuiditas pemilik

Merger dan akuisisi diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Jika perusahaan lebih besar, maka pasar saham akan lebih besar, sehingga lebih likuid.

7. Melindungi diri dari pengambilalihan

Perusahaan melakukan merger dan akuisisi untuk menghindari penggabungan dengan perusahaan lain yang tidak diinginkan. *Target firm* mengakuisi perusahaan lain dan membiayai pengakuisisian dengan hutang, sehingga akan memberatkan *bidding firm* (Gitman, 2003).

Menurut Morris (2000) ada lima alasan merger dan akuisisi, yaitu:

1. *Faster growth*

2. *Vertical integration*

3. *Acquisition of asset and personnel*
4. *Portfolio investment*
5. *Change in industries*

#### **2.2.4 Kelebihan dan Kekurangan Merger dan Akuisisi**

Penggabungan dengan merger lebih sederhana dan membutuhkan biaya yang lebih murah dibanding penggabungan lain. Namun merger memiliki kekurangan. Perusahaan yang akan melakukan merger harus berdasar keputusan rapat pemegang saham, dan untuk mendapatkan keputusan merger membutuhkan waktu yang lama (Harianto dan Sudomo, 2001).

Akuisisi tidak membutuhkan rapat pemegang saham, sehingga pemilik saham yang tidak setuju akuisisi dapat menahan saham yang dimilikinya. *Bidding firm* dapat langsung berhubungan dengan pemegang saham. Akuisisi aset membutuhkan rapat pemegang saham tetapi tidak memerlukan suara mayoritas. Jika cukup banyak pemegang suara minoritas yang tidak setuju akuisisi, maka akuisisi gagal dilakukan. Akuisisi aset membutuhkan biaya tinggi untuk biaya balik nama aset (Harianto dan Sudomo, 2001).

#### **2.2.5 Faktor Keberhasilan Merger dan Akuisisi**

Keberhasilan suatu merger dan akuisisi bergantung pada analisis dan penelitian perusahaan yang akan bergabung. Menurut Neil M. Kay (1997), dalam bukunya *Pattern in Corporate Evaluation*, merger dan akuisisi akan berhasil jika perusahaan yang akan bergabung memiliki *market link* dan *technological link*. Robbins (2000), dalam bukunya *Organizational Behaviour*, berpendapat bahwa budaya organisasi antar perusahaan adalah faktor penting yang akan menentukan

keberhasilan merger dan akuisisi. Sedangkan Pringle dan Harris (1987), dalam bukunya *Essentials of Managerial Finance*, menambahkan bahwa kinerja keuangan setelah penggabungan perusahaan yang menentukan keberhasilan penggabungan tersebut.

### **2.2.6 Dasar Hukum Penggabungan Usaha pada Bank**

Untuk mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat diperlukan langkah-langkah konsolidasi perbankan. Dalam rangka mendorong konsolidasi perbankan, perlu dilakukan penataan kembali struktur kepemilikan melalui penerapan kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia. Kebijakan kepemilikan tunggal merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan bank.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/16/PBI/2006, kepemilikan tunggal adalah suatu pihak hanya akan menjadi pemegang saham pada satu bank. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika:

1. Pemegang saham pengendali pada dua bank, melakukan kegiatan usaha yang prinsipnya berbeda.
2. Pemegang saham pengendali pada dua bank yang salah satunya merupakan Bank Campuran.
3. *Bank Holding Company*

Penyesuaian struktur kepemilikan sehubungan dengan peraturan tersebut adalah dengan mengalihkan sebagian atau seluruh sahamnya pada salah satu atau lebih bank yang dikendalikannya kepada pihak lain, dengan merger atau konsolidasi atas bank-bank yang dikendalikannya, atau membentuk Perusahaan Induk di Bidang

Perbankan (*Bank Holding Company*). *Bank Holding Company* harus merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. *Bank Holding Company* dilarang melakukan kegiatan lain selain menjadi pemegang saham bank.

Upaya percepatan konsolidasi perbankan pada bank-bank yang merger atau konsolidasi perlu diberikan insentif yang berguna sebagai stimulus. Insentif yang diberikan Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/17/PBI/2006 yang telah diubah dengan PBI No. 9/12/PBI/2007 meliputi:

1. Kemudahan dalam pemberian ijin menjadi bank devisa.
2. Kelonggaran sementara atas pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah.
3. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang timbul sebagai akibat merger dan konsolidasi.
4. Kemudahan dalam pemberian ijin pembukaan kantor cabang bank.
5. Penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan *due diligence*.
6. Kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberapa ketentuan dalam PBI yang mengatur *Good Corporate Governance* bagi bank umum.

## **2.3 Bank Perkreditan Rakyat**

### **2.3.1 Pengertian dan Kegiatan BPR**

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang hanya melakukan kegiatan usaha secara konvensional. BPR menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lain yang dapat dipersamakan.

Berbeda dengan Bank Umum, BPR tidak dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk badan hukum BPR berdasarkan kepemilikannya, yaitu:

1. Perseroan Terbatas
2. Koperasi
3. Perusahaan Daerah

Usaha BPR sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 1998 meliputi:

1. Menghimpun dana dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit kepada masyarakat.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), sertifikat deposito, deposito berjangka, atau tabungan pada bank lain.

Berdasarkan usaha yang dijalankan, BPR menyerap dana dalam bentuk:

1. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada BPR yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, sedangkan bunga/bagi hasil diberikan setiap bulan.
2. Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada BPR yang penarikannya dilakukan setelah jangka waktu tertentu yang disepakati, sedangkan bunga dibayarkan setiap bulan.

Dana bank (modal) adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Dana bank terdiri dari dana sendiri dan dana asing. Modal sendiri bank (*Equity Fund*) adalah sejumlah uang tunai yang telah

disetorkan pemilik dan sumber-sumber lainnya yang berasal dari dalam bank itu sendiri, terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.

1. Modal inti terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak. Secara rinci, modal inti dapat berupa:
  - a. Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya.
  - b. Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
  - c. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak.
  - d. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
  - e. Laba yang ditahan (*retained earning*), yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang diputuskan untuk tidak dibagikan.
  - f. Laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti sebesar 50%. Dalam hal mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
  - g. Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dari tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal ini

pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian menjadi faktor pengurang modal inti.

- h. Bagian kekayaan bersih pada anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan (*minority interest*), yaitu modal inti perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan. Anak perusahaan dapat berupa bank lain, lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan yang mayoritas sahamnya dimiliki bank.

Modal inti tersebut di atas harus dikurangi dengan:

1. *Goodwill* yang ada dalam pembukuan bank.
  2. Kekurangan jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif dari jumlah yang sebenarnya dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia.
2. Modal pelengkap terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak, serta pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa:
- a. Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.
  - b. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif.

- c. Modal kuasa disebut juga sebagai *hybrid (debt/equity) capital instrument*, yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau utang dan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1. Tidak dijamin oleh bank bersangkutan/dipersamakan dengan modal (*subordinated*) dan telah dibayar penuh.
  2. Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia.
  3. Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi *retained earning* dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi.
  4. Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.
- d. Pinjaman Subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman.
  2. Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut.
  3. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh, minimal berjangka waktu 5 tahun.
  4. Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat.

5. Hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

Dalam menjalankan usahanya, BPR menggunakan tiga acuan operasional, yaitu:

1. Acuan komersial, yaitu optimalisasi keuntungan dengan memperhatikan rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, persaingan, dan potensi.
2. Acuan legal adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap konsisten melakukan peraturan yang berlaku.
3. Acuan ideal, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh dengan memperhatikan kebijaksanaan pembangunan nasional.

### **2.3.2 Pengertian Kesehatan Bank**

Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan perbankan. Kegiatan tersebut meliputi:

1. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain dan dari modal sendiri.
2. Kemampuan mengelola dana.
3. Kemampuan menyalurkan dana kepada masyarakat.
4. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal dan pihak lain.

5. Kemampuan memenuhi peraturan perbankan yang berlaku.

### **2.3.3 Kinerja Keuangan**

Sektor perbankan sebagai lembaga intermediasi yang menunjang perekonomian mempunyai posisi yang strategis. Untuk mendorong terciptanya perbankan yang tangguh dan efisien, diperlukan BPR yang mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil baik di pedesaan maupun perkotaan. Hal ini bertujuan untuk melakukan pemerataan pelayanan perbankan, pemerataan berusaha, dan pemerataan pendapatan. Bank umum di Indonesia, baik itu milik pemerintah maupun milik swasta, dianggap belum mampu melayani masyarakat lapisan bawah seperti halnya BPR. Untuk menciptakan BPR yang tangguh dan efisien, maka salah satu peraturan yang dibuat pemerintah adalah merger antar BPR sehingga hanya akan terdapat satu BPR dalam setiap kabupaten.

Salah satu tujuan merger dan akuisisi adalah terciptanya sinergi, salah satunya sinergi dari sisi finansial. Keberhasilan merger dan akuisisi pada sisi finansial dikatakan berhasil jika perusahaan hasil merger dan akuisisi memiliki kemampuan menghasilkan laba yang lebih besar dibanding sebelum melakukan merger dan akuisisi. Selain sinergi pada sisi finansial, diharapkan juga tercipta sinergi dari sisi operasional. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan pendapatan (*revenue enhancement*) dan pengurangan biaya (*cost reduction*).

Kinerja keuangan digunakan untuk mengukur hampir setiap aspek kinerja perusahaan. Kinerja keuangan digunakan sebagai faktor pengukur efektifitas dan efisiensi suatu organisasi. Penurunan kinerja keuangan secara terus menerus dapat

menyebabkan *Finacial Distress*. *Financial Distress* pada bank yang tidak segera diatasi dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan nasabah.

Analisis rasio laporan keuangan adalah mengukur profitabilitas dan pertumbuhan suatu perusahaan (Palepu, 1997). Analisis dengan menggunakan rasio CAMEL untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan bank, serta untuk mengetahui gejala permasalahan dalam bank yang dianalisis. Rasio CAMEL menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Capital* (Aspek Permodalan)

Dalam aspek ini dihitung perbandingan modal sendiri dengan total aset. Modal sendiri didapat dari modal inti/disetor, modal sumbangan, selisih penjabaran laporan keuangan, dan selisih aset tetap dan laba ditahan. Rasio yang digunakan adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*).

2. *Asset* (Aspek Kualitas Aset)

Aspek kualitas aset dalam penelitian ini menggunakan rasio PPAP, yaitu perbandingan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang telah dibentuk dengan Aktiva Produktif. Semakin rendah nilai rasio PPAP, menunjukkan bank semakin sehat.

3. *Management* (Aspek Kualitas Manajemen)

Penilaian manajemen merupakan penilaian terhadap kemampuan manajerial pengurus Bank untuk menjalankan usahanya, kecukupan manajemen risiko, dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya. Penilaian ini juga untuk menilai

tingkat kepatuhan bank, yang dimaksud dengan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku antara lain kepatuhan terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit, Posisi Devisa Neto, dan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*). Berdasarkan PBI PBI No.6/10/2004, untuk meneliti kualitas manajemen digunakan 250 pertanyaan. Dalam penelitian ini, dikarenakan keterbatasan data yang tersedia, maka tidak dapat dilakukan penilaian terhadap manajemen.

#### 4. *Earning* (Aspek Rentabilitas)

Aspek rentabilitas dihitung dengan menggunakan *Return on Asset* (ROA), rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BO/PO), dan *Net Interest Margin* (NIM). Semakin besarnya NIM maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank semakin tinggi, sehingga kemungkinan bank dalam keadaan bermasalah semakin kecil.

#### 5. *Liquidity* (Aspek Likuiditas)

Aspek likuiditas dalam penelitian ini didapat dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *cash ratio*. LDR yaitu perbandingan jumlah kredit yang diberikan dengan seluruh dana yang berhasil dihimpun dan modal sendiri. *Cash ratio* adalah perbandingan alat likuit dan hutang lancar.

## 2.4 PD BPR BKK Boja

BKK di Kabupaten Kendal dibentuk sesuai dengan surat keputusan Gubernur pada tanggal 4 September 1969. Selanjutnya sejak tanggal 8 Oktober 1991 secara resmi diubah menjadi BPR sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.

1064/KMK.00/1988 pada tanggal 27 Oktober 1988. Kemudian disempurnakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 279/KMK.01/1989 pada tanggal 25 Maret 1989.

BPR BKK Boja merger pada tanggal 30 Maret 2007 berdasar keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/4/KEP.DeG/2007 tentang pemberian izin penggabungan usaha (merger). 12 PD BPR BKK di Kabupaten Kendal melakukan penggabungan usaha ke dalam PD BPR BKK Boja yang berkantor pusat di Jl. Pahlawan No. 1732 A Boja, Kendal. Seiring dengan perkembangan yang semakin pesat, kantor pusat BPR BKK Boja dipindah ke Jl. Soekarno Hatta N. 335 Kendal pada tanggal 16 Februari 2009. PD BPR BKK Boja memiliki visi menjadi bank yang sehat dan prima dalam pelayanan, sedangkan misi PD BPR BKK Boja yaitu:

1. Memberikan pelayanan yang cepat dan akurat kepada nasabah.
2. Membantu pengembangan usaha kecil dan mikro.
3. Menyediakan produk jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Prospek perekonomian Kabupaten Kendal yang semakin meningkat merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang dapat meningkatkan kapasitas perekonomian dan pendapatan daerah. Hal ini akan membawa dampak yang luar biasa terhadap perkembangan perekonomian daerah, terutama dalam kaitannya dengan likuiditas perekonomian daerah. Peningkatan likuiditas perekonomian daerah tersebut akan berpengaruh terhadap dunia perbankan di daerah itu. Seiring dengan hal tersebut, peran perbankan di daerah sangat besar dan strategis.

Kabupaten Kendal merupakan daerah yang potensial dan strategis bagi pelaku bisnis sebagai tempat untuk mengembangkan usahanya. Hal ini dapat dilihat dengan

makin banyaknya BPR yang beroperasi di Kabupaten Kendal. Sebagai lembaga intermediasi yang menerima dan menyalurkan dana masyarakat, pangsa pasar BPR BKK Boja secara umum bisa dikatakan pada sektor usaha kecil menengah (UKM) dan bergerak pada sektor ekonomi pertanian, perdagangan, industri rumah tangga, jasa, dan simpan pinjam kelompok. Pembiayaan kredit sebaiknya merata untuk seluruh sektor untuk meminimalkan resiko. Pembenahan dilakukan terus menerus harus dilakukan untuk memaksimalkan segala potensi yang ada untuk meraih pasar yang lebih besar.

PD BPR BKK Boja dibentuk dengan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta meningkatkan taraf hidup rakyat dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. PD BPR BKK Boja berfungsi sebagai salah satu lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Tugas PD BPR BKK Boja antara lain:

1. Menjadi salah satu lembaga penggerak ekonomi kerakyatan.
2. Membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
3. Memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha.
4. Menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannya, PD BPR BKK Boja menyelenggarakan usaha-usaha antara lain:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan.

2. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap nasabah.
3. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), giro, deposito berjangka, sertifikat deptsita atau jenis-jenis lainnya pada Bank lain.
4. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PD BPR BKK merger pada tanggal 30 Maret 2007 berdasar peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 tahun 1999 tentang merger, konsolidasi dan akuisisi bank.
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/52/KEP/Dir tanggal 14 Mei 1999 tentang persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi dan akuisisi Bank Perkreditan Rakyat.
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PD BPR BKK se Kabupaten Kendal pada 6 Oktober 2006 tentang tindak lanjut proses merger PD BPR BKK se Kabupaten Kendal.
4. Surat Keputusan Deputi Gubernur BI No. 9/4/KEP.DpG/2007 tentang pemberian izin penggabungan usaha (merger) PD BPR BKK Sukorejo, PD BPR BKK Patean, PD BPR BKK Plantungan, PD BPR BKK Brangsong, PD BPR BKK Patebon, PD BPR BKK Cepiring, PD BPR BKK Kaliwungu, PD BPR BKK Singorojo, PD BPR BKK Limbangan, PD BPR BKK Gemuh, PD BPR BKK Pegandon, dan PD BPR BKK Pageruyung ke dalam PD BPR BKK Boja Kabupaten Kendal.

5. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 539/14/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang persetujuan ijin penggabungan usaha ( merger).
6. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 539/15/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang pengangkatan direksi dan dewan pengawas PD BPR BKK Boja Kabupaten Kendal Hasil Merger tahun 2007.
7. Undangan Bupati Kendal No. 005/898/Ek tanggal 27 Maret 2007 perihal RUPS PD BPR BKK Boja.

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

### **2.5.1 Penelitian Agustina Maria Wulansari**

Penelitian Agustina Maria Wulansari berjudul "Analisis Tingkat Kesehatan Bank pada PD BPR BKK se Kabupaten Pati Tahun 2002-2004". Populasi pada penelitian Agustina Maria Wulansari adalah 21 PD. BPR BKK yang ada di Kabupaten Pati, sedangkan sample yang diambil adalah 17 BPR BKK. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan BPR BKK Kabupaten Pati dari tahun 2003-2004 meningkat, sedangkan hasil komponen CAMEL dari tahun 2002-2004 mengalami fluktuatif.

Pada penelitian ini penulis meneliti tentang "Analisis Perubahan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger pada PD BPR BKK Boja". Populasi yang digunakan adalah 12 BPR BKK di Kabupaten Kendal yang merger. Perbedaan dengan penelitian Agustina Maria Wulansari adalah objek penelitian dan rentang waktu penelitian.

### **2.5.2 Penelitian Palupi Ratna Kurniasari**

Penelitian Palupi Ratna Kurniasari berjudul "Evaluasi tingkat Kesehatan Sebelum dan Sesudah Merger pada PD BPR BKK Kota Semarang". Penelitian ini menggunakan populasi 9 BPR BKK yang merger di Kota Semarang. Sama dengan penelitian terdahulu, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Palupi ini juga menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumen. Hasil penelitian Palupi menunjukkan bahwa tingkat kesehatan PD BPR BKK Kota Semarang sesudah merger mengalami peningkatan di bidang permodalan, kualitas asset, dan manajemen. Pada bidang rentabilitas dan likuiditas mengalami penurunan setelah merger.

Penelitian Palupi yang menarik penulis untuk meneruskan penelitian tentang PD BPR BKK yang merger. Penelitian Palupi memacu penulis untuk mengetahui apakah hasilnya akan sama jika objek penelitian berbeda. Penulis menggunakan objek penelitian yang berbeda, yaitu di Kabupaten Kendal.

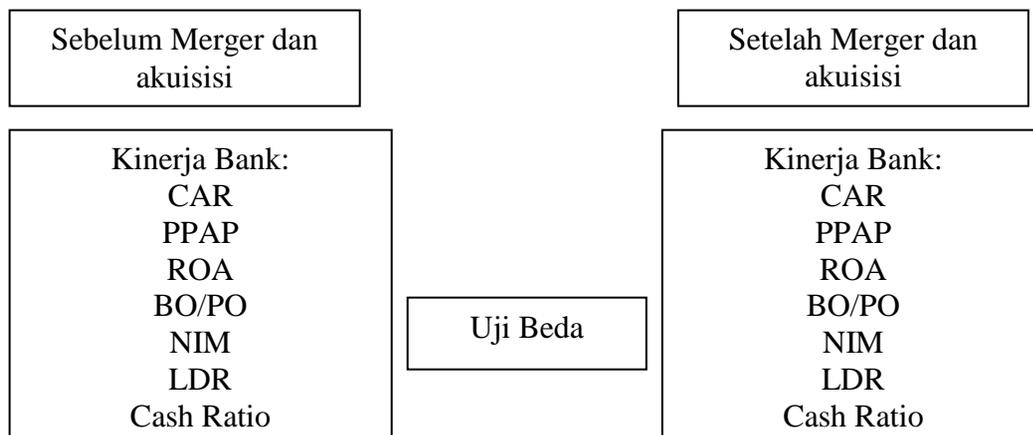
### **2.5.3 Penelitian Siti Rizanah**

Objek penelitian Siti Rizanah adalah 9 BPR BKK yang ada di Kabupaten Semarang. Sama dengan penelitian Palupi, penelitian Rizanah menggunakan analisis deskriptif dengan membandingkan tingkat kesehatan BPR BKK sebelum dan sesudah merger dari tahun 2003-2005.

Hasil dari penelitian Rizanah menunjukkan bahwa sesudah merger terdapat peningkatan di bidang permodalan, kualitas aset, dan manajemen. Aspek rentabilitas dan likuiditas mengalami penurunan.

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Penggabungan BPR sesuai keputusan Bank Indonesia bertujuan untuk mempermudah pengawasan, baik oleh pemilik atau pemerintah daerah, maupun oleh Bank Indonesia. Selain itu, tujuan merger BPR adalah untuk memperkuat modal BPR sehingga diharapkan kinerja BPR akan meningkat. Keberhasilan merger dapat dilihat dari peningkatan kinerja BPR setelah merger. Peningkatan kinerja dilihat dari kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan bank. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini disusun dengan kerangka pemikiran sebagai berikut



## 2.7 Hipotesis

Pengertian merger secara sempit adalah penggabungan sumber daya dua perusahaan dengan ekuitas yang hampir sama ( Bryan Coyle, 2000). Berdasarkan pengertian tersebut diharapkan dengan merger maka capital dan asset bank akan meningkat dalam rangka memenuhi kebijakan Bank Indonesia No. 8/16/PBI/2006 yaitu jumlah minimum modal Bank Perkreditan Rakyat. Salah satu unsur modal dalam perbankan adalah laba tahun berjalan. Latar belakang merger adalah adanya sinergi. Sinergi adalah kemampuan lebih yang diperoleh dari penggabungan dua atau lebih kekuatan. Sinergi menggambarkan penggabungan dua faktor akan

menghasilkan tenaga yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah tenaga yang dihasilkan sebelum bergabung. Salah satunya adalah sinergi finansial, sinergi ini bermakna kemampuan menghasilkan laba perusahaan hasil merger dan akuisisi yang lebih besar dari kemampuan laba masing-masing perusahaan sebelum merger dan akuisisi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini menggunakan hipotesis:

H1: Terdapat perbedaan capital setelah merger

H2: Terdapat perbedaan asset setelah merger

Selain sinergi finansial, juga terdapat sinergi operasional yang menjadi tujuan merger. Sinergi operasional dapat terjadi berupa peningkatan pendapatan (revenue enhancement) dan pengurangan biaya (cost reduction). Para perencana merger dan akuisisi cenderung melihat pengurangan biaya sebagai sumber utama sinergi operasional. Dari penjelasan tersebut maka penelitian menggunakan hipotesis:

H3: Terdapat perbedaan rentabilitas setelah merger

Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang hutangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan. Secara praktis, likuiditas suatu bank sering dikaitkan dengan jumlah dana pihak ketiga yang terdapat di bank tersebut pada waktu tertentu. Dalam hal ini, untuk kondisi Indonesia, Pemerintah melalui Bank Sentral menetapkan kewajiban setiap bank untuk memelihara likuiditas wajib minimum sebesar 5% dari besarnya kewajiban terhadap pihak ketiga. Dalam hal ini, kewajiban kepada pihak ketiga. Merger adalah penggabungan hak dan kewajiban bank-bank yang merger, maka dengan merger

terjadi penggabungan dana pihak ketiga dari bank-bank yang merger, sehingga akan terjadi perubahan pada likuiditas bank. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah:

H4: Terdapat perbedaan pada likuiditas setelah merger

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi dan Sample**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono,2006). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh BPR yang beroperasi di Kabupaten Kendal. Nama-nama BPR didapat dari situs Bank Indonesia. Penarikan sample dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penarikan sample dengan pertimbangan tertentu yang didasarkan pada tujuan penelitian. Sample pada penelitian ini meliputi PD BPR BKK Boja dan cabang-cabangnya yang ada di Kabupaten Kendal dengan kriteria:

1. BPR milik pemerintah daerah, atau yang disebut BPR BKK
2. BPR yang telah merger sejak tahun 2006 sehingga dapat diukur kinerja dua tahun sebelum merger dan dua tahun sesudah merger.
3. Laporan keuangan mempunyai tahun buku yang berakhir 31 Desember dan telah diaudit.

#### **3.2 Data dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan adalah laporan keuangan dua tahun sebelum merger dan dua tahun setelah merger, yaitu tahun 2005 sampai tahun 2009. Sedangkan data didapat dari

situs Bank Indonesia dan laporan keuangan dari cabang-cabang PD BPR BKK Boja yang merger .

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dengan metode dokumentasi, data diperoleh dari laporan keuangan cabang-cabang PD BPR BKK Boja untuk memperoleh data sebelum merger dan laporan keuangan dari kantor pusat PD BPR BKK Boja untuk memperoleh data setelah merger. Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan publikasi dari setiap bank yang berakhir buku pada 31 Desember dan telah diaudit.

### 3.4 Definisi Operasional

Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif. Menurut Sugiyono (2006), penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini membandingkan kinerja BPR sebelum dan sesudah merger. Kinerja didefinisikan sebagai prestasi manajemen dalam beroperasi. Kinerja yang diteliti dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja sebelum merger dan kinerja sesudah merger. Terdapat rentang waktu yang menyebabkan kinerja dapat dibandingkan, yaitu sebelum dan setelah merger.

Rasio CAMEL digunakan dalam mengukur kinerja keuangan BPR yang merger. Rasio yang digunakan antara lain:

1. *Capital* dengan menggunakan indikator CAR yang diperoleh dari:

$$CAR = \frac{\text{modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}}$$

2. Indikasi kualitas aset yang digunakan adalah PPAP yang diperoleh dari:

$$PPAP = \frac{PPAP \text{ yang telah dibentuk}}{PPAP \text{ yang wajib dibentuk}}$$

3. Aspek rentabilitas menggunakan indikator ROA, BO/PO dan NIM yang diperoleh dari:

$$ROA = \frac{\text{laba bersih}}{\text{total aktiva}}$$

$$BO/PO = \frac{\text{total beban operasional}}{\text{total pendapatan operasional}}$$

$$NIM = \frac{\text{pendapatan bunga bersih}}{\text{aktiva produktif}}$$

4. Aspek likuiditas menggunakan indikator LDR dan *Cash Ratio* yang diperoleh dari:

$$LDR = \frac{\text{seluruh kredit yang berhasil ditempatkan}}{\text{seluruh dana yang berhasil dihimpun + modal sendiri}}$$

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{alat likuit}}{\text{aktiva produktif}}$$

### 3.5 Uji Normalitas Data

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah metode *paired sample t-test*. Dengan menggunakan bantuan *Software SPSS for Windows*. Sebelum hipotesis diuji, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data *Kolmogorov-Smirnov* untuk melihat apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka data terdistribusi normal, namun apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka data terdistribusi tidak normal. Jika data terdistribusi normal, pengujian hipotesis menggunakan *paired sample t-test*, sedangkan data yang tidak terdistribusi normal, pengujian hipotesis menggunakan uji data berperingkat Wilcoxon.

### 3.6 Analisis Hipotesis

Hipotesis diuji dengan menggunakan *paired sample t-test*. Langkah-langkah penggunaan uji t, yaitu:

1. Menghitung selisih (d) antara pengamatan sebelum dan setelah.
2. Menghitung d rata-rata, kemudian mengkuadratkan selisih tersebut dan menghitung total selisih kuadrat.
3. Mencari standar deviasi (sd) dengan rumus:

$$s = \sqrt{\frac{\sum (d_i - \bar{d})^2}{n-1}}$$

4. Menghitung t hitung dengan rumus:

$$t = \frac{\bar{d}}{s/\sqrt{n}}$$

5. Kriteria pengambilan keputusan untuk pengujian hipotesis adalah jika probabilitas > 0,05, maka H1 ditolak dan jika probabilitas < 0,05, maka H1 diterima.